

BIBLIOGRAPHY

Books

- Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung, Mandar Maju.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Zainal Arifin Hoesein, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI “Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan”*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2010, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Surabaya, Kencana.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Press.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- S. Prayudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Jum Anggriani, 2011, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pensil Komunika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta, Konstitusi Press.

- Ni'matul Huda, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press, p. 75
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nomensen Sinamo, 2016, *Ilmu Perundang-undangan*, Jakarta, Jala Permata Aksara.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Journals

- Enny Nurbaningsih, "Hirarki Baru Peraturan Perundang-Undangan", *Mimbar Hukum*, X, (2004).
- I Gde Edi Budiputra, Dualisme Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, IV (May, 2015).
- Muwahid, "Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945", *Al-Qanun*, XIII, (Desember, 2010).
- Fajri Nursyamsi, "Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, II (2015).
- Yuri Sulistyoy, Antikowati, & Rosita Indrayati, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah) Melalui Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah", *e-Journal Lentera Hukum*, I, (April 2014)
- M. Zamroni, "Pengujian Peraturan Daerah: Sebuah Telaahan Kritis (*Testing Local Regulations: A Critical Findings*)", *Jurnal Legislasi*, III (September, 2013).
- M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi", *Jurnal RechtsVinding*, III (December, 2012).

Enrico Simanjuntak, “Pengujian Perda dan Perdes Pasca Perubahan UU Pemda dan UU Desa”, *Jurnal Konstitusi*, XIII, (September, 2016).

Simon Butt, “Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia”, *Sydney Law Review*, XXXII, (2010).

Mulyanto Achmad, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, *Yustisia*, (Edisi 85 Januari-April 2013).

Machmud Aziz, “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, V, (2010).

Papers

Moh. Mahfud MD, 2009, “The Role of The Constitutional Court in The Development of Democracy in Indonesia”, (Presented in the World Conference on Constitutional Justice, Cape Town, January 23-24, 2009), retrieved from http://www.venice.coe.int/WCCJ/Papers/INA_Mahfud_E2.pdf on Friday, 17 Maret 2017 4.13 P.M.

Internet

Daftar Perda / Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan / Revisi, downloaded from http://www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2016/06/21/b/a/batal_perda_21_juni_2016.pdf on Monday, 27 Juni 2016, 9.30 P.M

Ministry of Home Affairs, “Presiden Umumkan Pembatalan 3.143 Perda Bermasalah”, retrieved from <http://www.kemendagri.go.id/news/2016/06/13/presiden-umumkan-pembatalan-3143-perda-bermasalah> on Monday, 27 Juni 2016, 9.30 P.M.

Metro TV, “Perda Bermasalah Siapa Salah”, watched from <https://www.youtube.com/watch?v=xKYuqeE6AHk> on Sunday, 19 Juni 2016, 07:15 P.M

- Tim UJDIH BPK Perwakilan Jawa Barat, 2017, "*Mekanisme Pencabutan / Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Bermasalah Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia*", retrieved from <http://bandung.bpk.go.id/files/2017/01/MEKANISME-PENCABUTAN-PRODUK-HUKUM-DAERAH.pdf> on Thursday, 13 April 2017, 04:05 P.M
- Hukum Online, "*Prosedur Uji Materiil Perda di Mahkamah Agung*", retrieved from <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt559a47cad176c/prosedur-uji-materiil-perda-di-mahkamah-agung-> on Tuesday, 21Maret 2017, 10.12 P.M
- Hukum Online, "*Masalah Dualisme Kewenangan Pengujian Perda Kabupaten/Kota*", retrieved from http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519308777eeb0/masalah-dualisme-kewenangan-pengujian-perda-kabupaten_kota on Monday, 08:25 P.M
- Sudut Hukum, "*Sinkronisasi Hukum*", retrieved from www.suduthukum.com/2016/11/sinkronisasi-hukum.html on Wednesday, 17 May 2017, 5.22 P.M
- Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN / BAPPENAS, "*Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV Tahun 2016*", retrieved from www.bappenas.go.id/files/update_perkembangan_ekonomi/LAPORAN%20TRIWULAN%20IV%20TAHUN%202016-FINAL.pdf on Friday, 7 April 2017, 5.47 P.M
- Sindonews.com, "*Kemendagri Paparkan Cabut Ribuan Perda*", retrieved from <https://nasional.sindonews.com/read/1117254/12/kemendagri-paparkan-alasan-cabut-ribuan-perda-1466071352> on Friday, 7 April 2017, 15.35 P.M
- Republika.co.id, "*Penghapusan Perda Miras Ciptakan Kekosongan Hukum*", retrieved from <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/23/07mitd282-penghapusan-perda-miras-ciptakan-kekosongan-hukum> on Friday 12 Mei 2017, 9.30 P.M

Liputan6.com, “Jurus Pemerintah Hilangkan Hambatan Investasi di Daerah” retrieved from <http://bisnis.liputan6.com/read/2625295/jurus-pemerintah-hilangkan-hambatan-investasi-di-daerah> on Tuesday 30 Mei 2017, 16.24 P.M

Rencana Pengembangan Wilayah dan Investasi Provinsi Papua Barat 2007-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat retrieved from <http://www.batukarinfo.com/system/files/Bab%207%20Final.pdf> on Wednesday 31 Mei 2017, 07.18 A.M

Undergraduate Thesis

Farhan Bestyaradi, 2014, “Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah” (Skripsi Sarjana tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah)

Legislations

Law No. 5 of 2004 on Supreme Court

Law No. 10 of 2004 on Formulation of Legislation

Law No. 48 of 2009 on Judicial Power

Law No. 12 of 2011 on the Formulation of Legislation

Law No. 23 of 2014 on Local Government

Regulation of Ministry of Home Affairs No. 80 of 2015 on Establishment of Local Regulation

Instruction of President No. 1 of 2016 on Acceleration of the Implementation National Strategic Project

Instruction of Ministry of Home Affairs No. 582/476/SJ on Revocation of Local Regulation, Regulation of Regional Heads and Decisions of Regional Heads that Hamper Bureaucracy and Investment.

Instruction of Ministry of Home Affairs No. 582/1107/SJ on Affirmation Intruction of Ministry of Home Affairs No.

582/476/SJ on Revocation of Local Regulation, Regulation of Regional Heads and Decisions of Regional Heads that Hamper Bureaucracy and Investment.